

VETERAN

DAN DISUNJANG OLEH VETERAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA



LIMA TOKOH
PEROLEH GELAR
PAHLAWAN NASIONAL

PERINGATAN
HUT KE-70 TNI

DPP LVRI
PERINGATI
HUT KE-59 LVRI

**PUNCAK
PERINGATAN
HARI PAHLAWAN**





▼ Indonesia dalam *International Day of UN Peacekeeper* di UNIFIL Headquarter, Lebanon, 2015

▼
Leonard F. Hutabarat, Ph.D./
NPV.08.026.583
Kepala Pusat P2K2
Amerika dan Eropa,
Kementerian Luar Negeri



INDONESIA DAN PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB

International Day of United Nations Peacekeepers diperingati setiap tanggal 29 Mei yang ditetapkan Majelis Umum PBB dalam Resolusi 57/129 sejak 2002. Dalam peringatan tahun 2015, Sekjen PBB memimpin upacara peringatan gugurnya lebih dari 106 *peacekeepers* selama tahun 2015 dalam 16 misi *UN peacekeeping*.

PERINGATAN TERSEBUT MERUPAKAN penghormatan atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian bagi mereka yang bertugas dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, sekaligus

mengenang mereka yang telah mengorbankan nyawa untuk perdamaian dunia.

Pada tanggal tersebut tahun 1948, untuk pertama kali PBB menggelar misi penjaga perdamaian PBB, *United Nations Truce Supervision Organization*

(UNTSO) di Palestina. Pasukan perdamaian PBB telah berkiprah di berbagai konflik di dunia.

Tak berlebihan, jika *UN Peacekeepers* (Pasukan Penjaga Perdamaian PBB) atau lebih dikenal sebagai *Blue Berets* atau *Blue Helmets*, mendapat anugerah



▼ Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Perwakilan Veteran Perdamaian dalam Peringatan Hari Veteran Nasional, Jakarta, 11 Agustus 2015

hadiah Nobel Perdamaian tahun 1988 (*Leonard F. Hutabarat, 2015*). Sejak tahun 1948 hingga akhir tahun 2015, terdapat 106.536 personil *Blue Helmets* dari 125 negara yang bertugas pada empat benua.

Misi Perdamaian

Sejarah *peacekeeping* diawali pidato bersejarah Lester B. Pearson, mantan Menteri Luar Negeri dan PM Kanada (1963-1968), di Majelis Umum PBB tanggal 2 November 1956. Ia menyatakan perlunya membentuk "*a truly international peace and police force*" dalam menjaga kesepakatan gencatan senjata dalam krisis Terusan Suez, kala itu. Keyakinan perlunya membentuk *peacekeeping force* inilah, yang membawa Pearson kemudian memperoleh hadiah Nobel Perdamaian tahun 1957.

Tentara dikirim ke medan perang, lebih dari tujuh dekade lalu itu, dengan bendera dan misi yang baru, yaitu perdamaian. Misi ini tidak ada preseden sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Misi

tersebut merupakan upaya untuk menghadapi dan mengalahkannya kekerasan dengan toleransi dan perang dengan perdamaian.

Kini, misi penjaga perdamaian PBB semakin kompleks dan multidimensi. Tugas dan tanggung jawabnya semakin meningkat. Operasi penjaga perdamaian PBB, mulai dari pengawasan pelaksanaan gencatan senjata dan kawasan penyangga (*buffer zone*), hingga kawasan demiliterisasi (*demilitarized zones*), termasuk di kawasan yang paling berbahaya di dunia, seperti Sudan, Lebanon, Kongo, dan Haiti.

Namun, misi perdamaian tersebut juga harus dibayar mahal dengan banyaknya korps baret biru PBB yang gugur dalam menghadapi situasi medan tugas yang sulit dan berbahaya. Sejak tahun 2001, bagi personil yang gugur dalam operasi perdamaian PBB, memperoleh penghargaan *Dag Hammarskjold Medal* dalam upacara di Markas PBB New York.

Medali yang diberikan Sekjen PBB tersebut terbuat dari kristal kaca, sebagai simbol simbol dari

kekuatan dan kemurnian dari mereka yang gugur. Penghargaan itu diserahkan kepada wakil negara yang warganya meninggal dalam misi perdamaian PBB, untuk diberikan kepada ahli waris.

Tercatat sebanyak 3.423 (*UNDPKO, 2015*) personel gugur dalam menjalankan tugas sebagai *peacekeepers* selama lebih dari setengah abad ini, termasuk Kopral N. Susilo dalam misi MONUSCO bulan November 2013.

Tidak juga terlupakan dalam sejarah Pasukan Garuda Indonesia, yakni gugurnya Kolonel Gunawan SP. dalam penugasan Konga IV di Vietnam (1973) dan Mayor GA Manullang dalam Konga III di Kongo (1964). Mereka gugur sebagai *peacekeepers* dengan keyakinan bahwa darma bakti mereka dapat membuat perbedaan antara perang dan damai, represi dan kebebasan. Mereka menunjukkan dalam tugas, bahwa konflik manusia dapat dicegah, dan janji perdamaian serta toleransi dapat terwujud di antara bangsa-bangsa.

Pengalaman Tujuh Dekade

Misi PBB, yaitu menciptakan dunia yang lebih aman dan adil. Bagi banyak pihak, kadangkala hal ini hanya sekadar nilai mulia yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagi negara yang terkoyak oleh ganasnya perang, perdamaian merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting. *UN Peacekeepers* membantu negara yang mengalami konflik guna menciptakan kondisi bagi terwujudnya perdamaian.

Mantan Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan, misi penjaga

perdamaian PBB masih sangat vital. Meskipun penggelaran pasukan penjaga perdamaian itu sendiri tidak dapat mengakhiri perang, namun dapat mencegah terjadinya kembali konflik, memberikan waktu dan ruang untuk resolusi konflik. Dengan kata lain, memberikan kesempatan bagi terwujudnya perdamaian.

Kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB telah memiliki pengalaman hampir tujuh dekade dan masih merupakan alat bagi masyarakat internasional untuk mengatasi isu yang sulit dari konflik antarnegara maupun intranegara.

Sampai dengan akhir 2015, kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB, sebagai berikut: Bangladesh (8.825), Etiopia (8.307), dan India (7.807), yang mencakup lebih 23% dari *Blue Berets* PBB saat ini. Hingga bulan Juni 2016, biaya operasi pasukan PBB mencapai lebih dari USD 8,27 miliar per tahun. Anggaran itu sebagian besar dibiayai oleh Amerika Serikat (28,4%), Jepang (10,8%), dan Perancis (7,2%).

Tanda Kehormatan Veteran

Dalam forum organisasi veteran internasional, khususnya pada pertemuan *World Veteran Federation* (WVF), selalu dihimbau agar Pemerintah Republik Indonesia dapat mengklasifikasikan mantan pasukan yang bergabung dalam penugasan perdamaian internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk diberikan Tanda Kehormatan Veteran Republik

Indonesia.

Berkaitan dengan desakan WVF tersebut, Indonesia perlu memberikan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada mantan pasukan yang bergabung dalam penugasan perdamaian internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Veteran Perdamaian Republik Indonesia.



▼ Mantan Menteri Luar Negeri RI Dr. Hassan Wirayuda dan (Alm) Ali Alatas berkunjung ke Kontingen Garuda XXIII-A / UNIFIL, Lebanon, 2007.

Atas jasa dan pengorbanan warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia, negara perlu memberikan penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan pemberian penghargaan secara tepat terhadap jasa dan pengorbanan Veteran Republik Indonesia dalam memperjuangkan, membela, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dalam melaksanakan

perdamaian dunia, sehingga seyogyanya perlu diganti.

Hal ini menyebabkan Pemerintah dan DPR mensahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 6, Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dapat diberikan kepada Warga Negara yang bergabung dalam kesatuan

bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Warga Negara yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia.

Dengan demikian, warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, serta telah ditetapkan sebagai penerima Tanda

Kehormatan Veteran Republik Indonesia, diberikan Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia.

Hal ini merupakan salah satu bentuk apresiasi negara terhadap para *peacekeepers* Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut juga sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Visi 4.000 Peacekeepers Indonesia

Sejak Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda XXIII-A/ UNIFIL ke Lebanon tahun 2006, Indonesia telah masuk dalam 20 besar negara kontributor Pasukan PBB dengan jumlah 1.069 personel pada akhir Desember 2007 dari 121 negara kontributor. Indonesia telah berhasil menempatkan Mayjen Imam Edy Mulyono, sebagai *Force Commander of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO).

Selain itu, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, juga pernah bertugas sebagai Panglima Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Timur Tengah, yaitu Panglima *United Nations Emergency Force* (UNEF) II tahun 1976-1979. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjuknya sebagai Panglima UNEF II tahun 1976 untuk memimpin pasukan gabungan beranggotakan 4.031 personel dari Australia, Kanada, Finlandia, Ghana, Indonesia, Polandia, dan Swedia. Pasukan PBB ini berhasil mengamankan jalan menuju perundingan damai

antara Mesir dan Israel yang berperang.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin turut mengharumkan nama bangsa di panggung politik dunia pada tahun 1978, dengan melaporkan kepada PBB, telah dilakukannya persiapan perundingan tingkat tinggi antara para pemimpin Mesir dan Israel.

Perdamaian akhirnya terwujud di Amerika Serikat pada 1979. Diawali dengan perundingan perdamaian di Camp David, yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian final di Gedung Putih, Washington DC, antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin, disaksikan Presiden AS Jimmy Carter.

Inilah kali pertama seorang Jenderal Indonesia dipercaya memimpin sebuah pasukan internasional, sesuatu yang belum pernah terjadi lagi hingga kini. Sampai kini, beliau merupakan satu-satunya Jenderal Indonesia yang pernah memimpin pasukan internasional dalam misi perdamaian yang beranggotakan kesatuan militer dari berbagai negara.

Memimpin sebuah *multinational peacekeeping mission* merupakan momen yang membanggakan bagi Indonesia yang telah terlibat dalam *peacekeeping operation* sejak tahun 1957. Kini, Indonesia menduduki peringkat ke-12 terbesar dari 125 negara sebagai kontributor dengan 2.840 personil pada sepuluh Kontingen Garuda. Indonesia juga telah mengirimkan sebanyak 31 personel wanita (2015) untuk

Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Indonesia, sejak tahun 2009.

Komitmen Indonesia dalam pembentukan *International Peace and Security Center* (IPSC) di Sentul, hingga pengiriman kapal laut dan transportasi helikopter UNIFIL di Lebanon dan Darfur di Sudan, merupakan beberapa upaya optimalisasi peran Indonesia dalam UN *peacekeeping*.

Indonesia tetap berkomitmen melanjutkan upaya meningkatkan kontribusi dan menuju *Vision 4.000 Peacekeepers Indonesia* sampai tahun 2019 untuk menjadi *the top ten largest contributor countries of the UN troops* (Retno L.P. Marsudi, 2015).

Hal tersebut akan menjadi sebuah perjalanan bersejarah bagi Indonesia untuk dekade-dekade berikut. Pemerintah Indonesia juga perlu menetapkan kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia pada misi UN *peacekeeping* sebagai bagian dari instrumen kebijakan luar negeri Indonesia.

Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang memerlukan pendekatan yang strategis dan holistik. Menetapkan sebuah "*White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission*" akan menjadi salah satu faktor dan langkah penting pertama yang sangat penting.

"*The Peacekeeping Forces are recruited from among the young people of many nations, who, in keeping with their ideals, voluntarily take on a demanding and hazardous service in the cause of peace* (Ban Ki-Moon, 2014)".

Salam Garuda!